

Pembatalan pendirian perseroan terbatas yang didasarkan pemalsuan subjek hukum pemegang saham: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby = Cancellation of the establishment of a limited liability company based on falsification of legal subjects of shareholders: case study of the Surabaya District Court Decision number 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby

Vinadita Utari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20511036&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku. KTP tersebut tidak berlaku karena klien yang bersangkutan telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) dengan memiliki paspor Warga Negara Singapura. Namun klien yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Notaris bahwa ia sudah menjadi WNA. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham serta tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta pendirian tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan akta pendirian Perseroan Terbatas mengandung unsur pemalsuan Subjek hukum pemegang saham sehingga akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum. Akta Pendirian yang cacat hukum akan menjadi akta dibawah tangan karena telah terjadi degradasi kekuatan pembuktian akta autentik. Akibatnya akta tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 7 ayat (1) UUPJ. Sehingga semua perbuatan hukum serta hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan akta pendirian perseroantersebut dinyatakan batal/tidak sah dan keadaan para pihak dalam akta pendirian perseroan dipulihkan dalam keadaan sebelum akta dibuat. Notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) UUPJ. Notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dan administratif atas batalnya akta pendirian perseroan jika ternyata lalai menjalankan jabatannya.

.....This thesis discusses the Cancellation of the Establishment of a Limited Liability Company Based on Falsification of the Legal Subject of Shareholders. In terms of making and signing authentic deeds, notaries should always prioritize the principles of prudence and professionalism towards clients who make the companys deed of incorporation. This is possible if there is bad faith from the client who comes to the notary and shows a false identity. This identity is a valid Identity Card (KTP). The KTP is not valid because the client in question has become a foreign citizen (WNA) by holding a Singapore citizen passport. However, the client in question did not inform the notary that he had become a foreigner. The issues raised in this study are regarding the Cancellation of the Establishment of a Limited Liability Company based on Falsification of the Legal Subject of Shareholders and the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed of establishment. To answer these problems, this study uses a normative juridical research, with a

descriptive analytical typology. The results showed that the Deed of Establishment of a Limited Liability Company contained elements of forgery. The legal subject of shareholders so that the deed of incorporation of the company became legally flawed. A deed of establishment that is legally flawed will become a deed under hand because there has been a degradation of the evidentiary power of the authentic deed. As a result, the deed is null and void because it does not comply with the elements of Article 7 paragraph (1) of the Company Law. So that all legal actions as well as rights and obligations obtained based on the deed of establishment of the company are declared null and void and the condition of the parties in the deed of establishment of the company is restored in the state before the deed was drawn up. The notary has carried out his obligations in accordance with Article 16 paragraph (1) and paragraph (7) UUJN. Notary public can be responsible civil and administratively for the cancellation of the companys deed of establishment if it turns out that he has neglected to carry out his position.